

PENGELOLAAN PENGETAHUAN BERBASIS KNOWLEDGE-BASED VIEW (KBV) MELALUI RKJM MENUJU GENERASI CERDAS, KREATIF, DAN BERAKHLAK MULIA DI UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG

Abdul Hamid¹, Aini Nur Zam-zam², Ayu Rodiah³, Deni Firmansyah⁴, Fitria Roshi Ramadhani⁵, Ika
Martilla⁶, Salva Cistia Ritonga⁷, Sohiron⁸

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau ¹⁻⁸

Email: Abd.hamid110088@gmail.com¹, aininurzamzam76@gmail.com²,
aladiahayu@gmail.com³, denif8338@gmail.com⁴, fitriarosiramadhani8@gmail.com⁵,
ikamartilla@gmail.com⁶, salvaritonga123@gmail.com⁷, sohiron@uin-suska.ac.id⁸

Keywords

*RKJM, educational
planning, Education
Report Card, school
management*

Abstract

This study examines school planning management based on education management principles in supporting the vision of UPT SMP Negeri 4 Tapung through the integration of RKJM (Medium-Term School Work Plan) and data-driven planning using the Education Report Card (Rapor Pendidikan). The background of this research is the importance of structured educational planning in improving school quality and achieving educational goals effectively. The purpose of this study is to analyze the implementation of school planning, the transition from RKJM to data-based planning, and its alignment with school management practices. This research uses a qualitative descriptive method through document analysis, interviews, and observations involving the school principal and related stakeholders. The results show that the school has shifted from traditional RKJM planning to a more adaptive Perencanaan Berbasis Data (PBD) approach based on Rapor Pendidikan. The planning system is implemented systematically, involving stakeholders such as teachers, school committees, and education authorities, and is aligned with school vision and available resources. The findings also indicate that Rapor Pendidikan plays a crucial role in determining program priorities and improving decision-making in school management. In conclusion, data-based planning strengthens school management effectiveness, improves transparency, and supports sustainable educational development.

*RKJM, perencanaan
pendidikan, Rapor
Pendidikan, manajemen
sekolah*

Penelitian ini mengkaji pengelolaan perencanaan sekolah berbasis prinsip manajemen pendidikan dalam mendukung visi UPT SMP Negeri 4 Tapung melalui integrasi RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan perencanaan berbasis data menggunakan Rapor Pendidikan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya perencanaan pendidikan yang terstruktur dalam meningkatkan mutu sekolah dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perencanaan sekolah, peralihan dari RKJM ke perencanaan berbasis data, serta kesesuaiannya dengan praktik manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen,

wawancara, dan observasi dengan melibatkan kepala sekolah serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah beralih dari perencanaan RKJM konvensional menuju pendekatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang berlandaskan Rapor Pendidikan. Sistem perencanaan dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan serta selaras dengan visi sekolah dan sumber daya yang tersedia. Temuan juga menunjukkan bahwa Rapor Pendidikan berperan penting dalam menentukan prioritas program dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam manajemen sekolah. Kesimpulannya, perencanaan berbasis data memperkuat efektivitas manajemen sekolah, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Visi dan misi merupakan komponen strategis dalam manajemen pendidikan yang berfungsi sebagai arah, pedoman, dan dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program sekolah. Keberadaan visi dan misi yang jelas akan membantu sekolah dalam merancang program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (H. E. Mulyasa 2022).

Menurut (Freeman 1984b), keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal organisasi, tetapi juga oleh keterlibatan dan dukungan para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Dalam konteks pendidikan, stakeholder meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.

UPT SMP Negeri 4 Tapung memiliki visi “Mewujudkan UPT SMP Negeri 4 Tapung sebagai sekolah unggulan untuk membangun generasi cerdas, kreatif dan berakhlak mulia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah telah merumuskan berbagai misi yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada murid, penguatan karakter, peningkatan kompetensi pendidik, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Visi dan misi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program sekolah dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Meskipun visi dan misi sekolah telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum sepenuhnya optimal, penerapan asesmen formatif belum merata pada seluruh pendidik, dan masih diperlukan penguatan

kepemimpinan instruksional dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, keterlibatan stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi program sekolah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal.

Penelitian mengenai pengelolaan visi dan misi sekolah umumnya berfokus pada aspek kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen strategis. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pengelolaan visi dan misi sekolah berdasarkan perspektif *Stakeholder Theory* masih relatif terbatas, khususnya pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan visi dan misi sekolah dapat mendukung terwujudnya sekolah unggulan.

Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh (Freeman 1984a) menjelaskan bahwa organisasi harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Dalam lembaga pendidikan, stakeholder tidak hanya berperan sebagai penerima layanan pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah (Hidayat and Machali 2018).

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan perencanaan pendidikan di UPT SMP Negeri 4 Tapung, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui ketersediaan serta kelengkapan dokumen RKJM yang dimiliki sekolah sebagai salah satu dokumen penting dalam sistem perencanaan pendidikan. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian sistematika dan substansi RKJM dengan pedoman penyusunan yang berlaku sehingga dapat diketahui sejauh mana dokumen tersebut memenuhi standar pengelolaan pendidikan.

Selanjutnya, observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara RKJM dengan visi dan misi sekolah serta data Rapor Pendidikan yang menjadi dasar dalam penyusunan program sekolah. Melalui kegiatan ini, peneliti juga berupaya mengkaji hubungan antara RKJM, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Selain itu, observasi bertujuan untuk menganalisis mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan sekolah terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dengan demikian, hasil observasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sekolah, sekaligus menjadi sarana untuk memahami penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang digunakan oleh SMP Negeri 4 Tapung dalam menentukan prioritas program dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 4 Tapung, Kabupaten Kampar, pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 10.00–11.30 WIB. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, H. Syukri, S.Ag., yang dipilih karena memiliki peran utama dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara langsung, observasi lapangan, dan validasi dokumen RKJM. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi yang mencakup aspek legalitas, sistematika, dan substansi dokumen perencanaan sekolah. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai pengelolaan perencanaan sekolah berbasis Knowledge-Based View (KBV) di UPT SMP Negeri 4 Tapung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Dokumen RKJM

Berdasarkan hasil observasi di UPT SMP Negeri 4 Tapung, ditemukan bahwa sekolah tidak lagi menggunakan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sebagai acuan utama. Sebagai gantinya, sekolah menerapkan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang berlandaskan Rapor Pendidikan. Dari sisi legalitas, dokumen PBD/RKS yang ada telah memenuhi aspek formal: disahkan oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Komite Sekolah, serta diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sebelum pelaksanaan program dan pencairan dana BOS. Namun demikian, salinan dokumen RKJM dan SK Tim Penyusun RKJM tidak ditemukan di sekolah.

B. Sistematika RKJM

Karena dokumen yang ditemukan adalah RKS berbasis PBD, analisis sistematika dilakukan terhadap dokumen tersebut. Dokumen perencanaan sekolah telah disusun secara lengkap dan sistematis, mencakup cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, profil sekolah, analisis Rapor Pendidikan dan refleksi, rencana program sekolah, penutup, serta lampiran berupa notulen rapat dan dokumentasi kegiatan.

C. Kesesuaian Substansi RKJM

Substansi dokumen PBD/RKS dinilai dari aspek pendahuluan, profil sekolah, dan rencana program. Pada aspek pendahuluan, dokumen memuat kondisi riil sekolah, data Rapor Pendidikan, peluang dan tantangan lingkungan, landasan hukum, serta tujuan PBD secara jelas. Pada aspek profil sekolah, visi disusun sebagai pedoman program, misi telah selaras dengan visi, tujuan bersifat spesifik dan terukur, serta data PTK, siswa, dan sarana prasarana tercantum lengkap. Pada aspek rencana program, program disusun berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah, dilengkapi indikator keberhasilan yang terukur, pembagian waktu pelaksanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, estimasi biaya berbasis BOS, serta penetapan penanggung jawab yang jelas untuk setiap kegiatan.

D. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah SMPN 4 Tapung, Bapak H. Syukri, S.Ag., pada tanggal 15 Mei 2026. Hasil wawancara mengonfirmasi bahwa sekolah tidak lagi menggunakan RKJM secara khusus, melainkan menerapkan Perencanaan Berbasis Data (PBD) berbasis Rapor Pendidikan sebagai alat diagnostik mutu. Penyusunan RKS melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan disahkan. Sekolah juga menggunakan KOSP sebagai dokumen pelaksanaan program yang memuat kegiatan sekolah dan kriteria kelulusan, namun tidak memuat rincian anggaran. Program sekolah dibagi ke dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan prioritas pada permasalahan mendesak seperti kondisi fasilitas dan keamanan lingkungan. Pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai pedoman yang berlaku, disertai bukti pembelian dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Temuan

1. Ketiadaan RKJM sebagai Temuan Kritis: Antara Kelaziman Regulatif dan Realitas Lapangan

Temuan paling mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa UPT SMP Negeri 4 Tapung tidak lagi menggunakan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sebagai dokumen perencanaan strategis sekolah. Salinan dokumen RKJM maupun SK Tim Penyusun RKJM sama sekali tidak ditemukan di sekolah pada saat observasi dilakukan. Kondisi ini merupakan fakta lapangan yang harus dianalisis secara kritis, karena RKJM sejatinya merupakan instrumen perencanaan yang secara eksplisit diamanatkan dalam tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Pasal 4 regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun.

Absennya RKJM ini tidak serta-merta mencerminkan kelalaian administratif, melainkan perlu dipahami dalam konteks pergeseran kebijakan perencanaan pendidikan nasional yang terjadi secara bertahap sejak peluncuran platform Rapor Pendidikan pada tahun 2022. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mendorong satuan pendidikan untuk beralih dari model perencanaan berbasis rencana kerja normatif menuju Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang mengacu pada hasil evaluasi sistem pendidikan secara empiris. (Musakirawati et al. 2023) menjelaskan bahwa Rapor Pendidikan difungsikan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi akar permasalahan, merefleksikan capaian, dan merencanakan program pembenahan yang terukur, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dibandingkan pendekatan konvensional yang bersifat normatif.

Analisis lebih lanjut terhadap substansi dokumen RKS/PBD yang dimiliki sekolah menunjukkan bahwa secara isi, dokumen tersebut sesungguhnya telah memuat elemen-elemen yang seharusnya ada dalam RKJM, meliputi visi, misi, tujuan sekolah, profil, analisis kondisi, dan rencana program yang dibagi ke dalam periode jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan pada absennya perencanaan strategis, melainkan pada perbedaan nama dan kerangka dokumen yang digunakan. Hal ini menimbulkan potensi kesenjangan antara tuntutan regulasi yang masih mengacu pada RKJM dengan praktik lapangan yang telah bertransisi ke model PBD. Kesenjangan ini perlu mendapat perhatian serius agar sekolah tidak berada dalam

posisi rentan secara administratif-regulatif meskipun substansi perencanaannya telah memadai.

2. Perencanaan Berbasis Data sebagai Paradigma Baru: Analisis Kekuatan dan Keterbatasan

Penerapan PBD di SMP Negeri 4 Tapung menunjukkan beberapa kekuatan yang patut diapresiasi. Pertama, proses penyusunan RKS didasarkan pada hasil Rapor Pendidikan yang merupakan data objektif dan terstandarisasi secara nasional, sehingga program yang dirancang memiliki landasan empiris yang kuat. Kedua, program sekolah telah memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan penanggung jawab yang jelas, mencerminkan perencanaan yang akuntabel. Ketiga, penyusunan dokumen melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, yang mencerminkan proses partisipatif. Nasyrohah, (Herfiyanti, Setiyanti, and Wulandari 2024) menegaskan bahwa PBD yang memanfaatkan Rapor Pendidikan terbukti mampu mendorong peningkatan mutu sekolah secara terukur, karena program yang disusun langsung menjawab akar permasalahan yang teridentifikasi dari data.

Di sisi lain, terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan. Ketiadaan dokumen RKJM berarti sekolah tidak memiliki rekam jejak perencanaan jangka menengah yang dapat diverifikasi oleh pihak eksternal dalam format yang dipersyaratkan regulasi. Selain itu, penggunaan KOSP sebagai dokumen pelaksanaan program yang tidak memuat rincian anggaran berpotensi menyulitkan penelusuran keterkaitan antara program dan pembiayaan dalam kerangka evaluasi oleh pengawas sekolah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sinkronisasi antara pendekatan PBD yang telah diadopsi dengan tuntutan kelengkapan dokumentasi yang dipersyaratkan oleh regulasi yang berlaku.

3. Keterlibatan Stakeholder: Kuat di Perencanaan, Lemah di Monitoring

Analisis terhadap temuan lapangan mengungkap pola yang menarik dalam keterlibatan stakeholder: partisipasi aktif terjadi pada tahap perencanaan dan pengesahan dokumen, namun mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas masih perlu diperkuat. Komite sekolah terlibat dalam proses persetujuan RKS, namun tidak ditemukan mekanisme formal yang memastikan keterlibatan komite dalam pemantauan berkala pelaksanaan program. (Jaenudin 2024) menemukan bahwa keterlibatan stakeholder yang berhenti pada tahap persetujuan

administratif tidak cukup untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program secara berkelanjutan; diperlukan mekanisme pengawasan yang terstruktur agar fungsi komite sekolah dapat berjalan secara substantif.

B. Perbandingan dengan Teori dan Regulasi

1. Tinjauan melalui Stakeholder

Stakeholder Theory yang dikemukakan (Freeman 1984) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana organisasi tersebut memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang memiliki hubungan dengannya. Bila dikomparasikan dengan kondisi di SMP Negeri 4 Tapung, penyusunan RKS yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak Dinas Pendidikan secara prinsip sejalan dengan teori ini. Setiap kelompok stakeholder tersebut memiliki kepentingan dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi: kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, guru sebagai pelaksana teknis pembelajaran, komite sebagai wakil masyarakat, dan Dinas Pendidikan sebagai penjamin mutu eksternal.

Namun, bila dianalisis secara lebih kritis, penerapan Stakeholder Theory di sekolah ini belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan stakeholder bersifat siklus terbuka: aktif pada fase input (perencanaan) tetapi belum diimbangi dengan keterlibatan yang setara pada fase proses (pelaksanaan) dan output (evaluasi). (Machali & Hidayat 2016) menegaskan bahwa dalam lembaga pendidikan, stakeholder harus berperan sebagai mitra strategis tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan. Ketimpangan dalam siklus keterlibatan ini berpotensi mengurangi efektivitas program karena umpan balik dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program tidak tersalurkan secara sistematis.

2. Kesenjangan antara Regulasi RKJM dan Praktik PBD

Dari perspektif regulasi, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kewajiban formal penyusunan RKJM berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dengan praktik PBD yang diterapkan sekolah. Regulasi tersebut secara eksplisit mengharuskan setiap satuan pendidikan memiliki RKJM sebagai dokumen strategis empat tahunan. Di sisi lain, tentang Evaluasi Sistem Pendidikan secara implisit mendorong penggunaan data evaluasi sebagai basis perencanaan, yang dioperasionalkan melalui platform Rapor

Pendidikan. Kedua regulasi ini tidak secara eksplisit saling mencabut, sehingga secara teknis sekolah seharusnya tetap memenuhi keduanya.

Kondisi ini mencerminkan situasi yang juga ditemukan dalam penelitian (Andini et al. 2023) yang mengidentifikasi bahwa transisi dari dokumen perencanaan konvensional ke model berbasis data di lapangan seringkali menimbulkan ambiguitas regulatif, di mana sekolah memilih untuk mengimplementasikan pendekatan yang dipandang lebih substansial sambil melepaskan kewajiban administratif-formal. Artinya, sekolah lebih memprioritaskan kualitas isi perencanaan daripada kelengkapan format dokumen yang dipersyaratkan. Meskipun pilihan ini dapat dipahami dalam konteks perubahan kebijakan yang sedang berlangsung, implikasi hukum-administratifnya perlu mendapat klarifikasi dari otoritas yang berwenang.

3. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian dengan Prinsip Manajemen Strategis Pendidikan

(Sagala 2013) menegaskan bahwa manajemen strategis pendidikan yang efektif mensyaratkan adanya analisis kondisi organisasi yang mendalam, penetapan tujuan yang realistis, penyusunan program yang terstruktur, serta mekanisme evaluasi yang konsisten. Bila dibandingkan dengan temuan di SMP Negeri 4 Tapung, terdapat kesesuaian pada aspek analisis kondisi (melalui Rapor Pendidikan), penetapan program prioritas, dan keberadaan indikator keberhasilan. Namun, aspek evaluasi berkala yang melibatkan seluruh stakeholder masih memerlukan penguatan sistematis.

Lebih jauh, (Calam and Qurniati 2016) dalam kajian mereka tentang perumusan visi dan misi lembaga pendidikan menekankan bahwa visi yang efektif harus bersifat inspiratif, realistis, terukur, dan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi. Visi UPT SMP Negeri 4 Tapung yang menargetkan generasi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia telah memenuhi kriteria tersebut, dan kesesuaiannya dengan misi dalam dokumen RKS menunjukkan adanya koherensi internal perencanaan yang positif. Namun, mengacu pada (E. Mulyasa 2022), koherensi antara visi, misi, dan program hanya akan menghasilkan mutu yang diinginkan apabila didukung oleh kepemimpinan instruksional yang konsisten serta budaya evaluatif yang terlembagakan.

C. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan

1. Implikasi Peralihan dari RKJM ke PBD terhadap Akuntabilitas dan Mutu Perencanaan

Peralihan dari RKJM ke PBD memiliki implikasi ganda terhadap akuntabilitas sekolah. Di satu sisi, pendekatan PBD sesungguhnya meningkatkan kualitas substantif perencanaan karena program yang disusun berpijak pada data yang terverifikasi secara nasional, bukan semata-mata pada asumsi atau rutinitas administratif. (Herfiyanti et al. 2024) menyimpulkan bahwa sekolah yang secara konsisten memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai basis PBD mengalami peningkatan yang lebih terukur pada indikator prioritas dibandingkan sekolah yang belum mengoptimalkan pendekatan tersebut. Hal ini relevan langsung dengan visi SMP Negeri 4 Tapung untuk menjadi sekolah unggulan.

Di sisi lain, ketiadaan RKJM menimbulkan implikasi pada dimensi akuntabilitas formal. Ketika pengawas sekolah atau Dinas Pendidikan melakukan audit administratif menggunakan instrumen yang masih mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, sekolah akan dinilai tidak lengkap secara dokumen meskipun substansi perencanaannya sudah berkualitas. Oleh karena itu, implikasi praktisnya adalah sekolah perlu menyusun dokumen yang secara formal merangkum perencanaan jangka menengah berbasis data, baik dalam format RKJM yang diperbarui maupun dalam dokumen komprehensif yang secara eksplisit memenuhi fungsi RKJM sebagaimana dipersyaratkan regulasi yang masih berlaku.

2. Implikasi terhadap Pencapaian Visi Generasi Cerdas, Kreatif, dan Berakhlak Mulia

Visi UPT SMP Negeri 4 Tapung mengandung tiga dimensi capaian yang saling berkaitan: kecerdasan intelektual, kreativitas, dan akhlak mulia. Pencapaian ketiga dimensi ini membutuhkan perencanaan program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter secara holistik. Dokumen RKS/PBD yang telah memuat ketiga aspek tersebut dalam substansinya merupakan fondasi yang baik, namun implikasi terhadap mutu bergantung pada sejauh mana program-program tersebut diimplementasikan dengan konsisten dan dievaluasi secara berkala.

Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD memungkinkan sekolah mengidentifikasi secara spesifik permasalahan pada dimensi karakter dan iklim sekolah, bukan hanya pada dimensi literasi dan numerasi. Implikasinya bagi SMP Negeri 4 Tapung adalah bahwa data Rapor Pendidikan seharusnya tidak hanya digunakan untuk meningkatkan capaian akademik, tetapi juga untuk merancang intervensi yang secara

terukur mendorong penguatan akhlak dan kreativitas peserta didik. Dengan demikian, PBD yang diterapkan dapat menjadi jembatan nyata antara visi sekolah dengan perubahan perilaku dan kompetensi peserta didik secara terukur.

3. Implikasi terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah

Salah satu implikasi terpenting dari temuan penelitian ini adalah perlunya sekolah membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang lebih terstruktur. (Musakirawati et al. 2023) menjelaskan bahwa PBD yang efektif harus diintegrasikan ke dalam siklus penjaminan mutu yang mencakup:

- a. perencanaan berbasis analisis data Rapor Pendidikan
- b. pelaksanaan program yang termonitor
- c. evaluasi berkala yang melibatkan seluruh stakeholder
- d. tindak lanjut yang tertulis dan terverifikasi.

Siklus ini belum sepenuhnya terlembagakan di SMP Negeri 4 Tapung, terutama pada tahap evaluasi dan tindak lanjut yang melibatkan pemangku kepentingan secara formal.

Implikasi konkret bagi peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Tapung mencakup beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah yang secara formal memadukan pendekatan PBD dengan persyaratan regulatif RKJM sehingga sekolah tidak kehilangan dasar hukum administratif. Kedua, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu distrukturkan dengan melibatkan komite sekolah secara aktif dan periodik, bukan hanya pada tahap pengesahan. Ketiga, kapasitas seluruh guru dalam membaca dan menggunakan data Rapor Pendidikan perlu ditingkatkan melalui program pengembangan profesional yang berkelanjutan agar PBD tidak hanya menjadi urusan kepala sekolah, melainkan menjadi budaya reflektif seluruh warga sekolah. Keempat, visi sekolah yang memuat dimensi akhlak mulia perlu diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang terukur dalam dokumen perencanaan, sehingga pencapaian dimensi karakter dapat dipantau secara sistematis sebagaimana pencapaian dimensi akademik.

Dengan mengoptimalkan langkah-langkah tersebut, SMP Negeri 4 Tapung memiliki potensi yang nyata untuk mewujudkan visinya sebagai sekolah unggulan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga kuat dalam karakter dan kreativitas peserta didiknya. Fundamen perencanaan berbasis data yang telah dimiliki sekolah merupakan

modal strategis yang, apabila diperkuat dengan kelengkapan regulatif dan pendalaman keterlibatan stakeholder, akan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan terukur.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UPT SMP Negeri 4 Tapung telah bertransisi dari perencanaan berbasis RKJM konvensional menuju Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang berlandaskan Rapor Pendidikan. Dokumen PBD/RKS yang digunakan telah memenuhi aspek legalitas formal, disusun secara sistematis, dan memuat substansi perencanaan yang komprehensif mencakup visi, misi, analisis kondisi, serta program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Penerapan PBD menunjukkan sejumlah kekuatan, antara lain: program sekolah didasarkan pada data objektif Rapor Pendidikan, proses penyusunan bersifat partisipatif, serta pengelolaan dana BOS berjalan akuntabel. Namun, ketiadaan RKJM dalam format yang dipersyaratkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 menimbulkan potensi kesenjangan regulatif. Selain itu, keterlibatan stakeholder masih bersifat asimetris: kuat pada tahap perencanaan, namun belum didukung mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

Secara keseluruhan, perencanaan berbasis data terbukti memperkuat efektivitas manajemen sekolah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Optimalisasi lebih lanjut diperlukan pada aspek kelengkapan regulatif, pendalaman keterlibatan stakeholder secara menyeluruh, serta penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna mendukung pencapaian visi sekolah yang generasi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, sekolah perlu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang memadukan substansi PBD dengan persyaratan RKJM sebagaimana diamanatkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, agar tidak kehilangan pijakan hukum-administratif sekaligus tetap menjalankan perencanaan berbasis bukti empiris. Selain itu, perlu dilakukan pengarsipan kembali dokumen historis termasuk salinan RKJM dan SK Tim Penyusun sebagai referensi evaluasi berkelanjutan. Keterkaitan eksplisit antara RKS, RKT, dan RKAS juga perlu diperkuat agar setiap program dapat

ditelusuri pembiayaan dan ketercapaiannya secara akuntabel.

Dari sisi peningkatan kapasitas sekolah, keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan guru perlu diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi program melalui forum monitoring berkala. Seluruh pendidik juga perlu dibekali kemampuan membaca dan memanfaatkan data Rapor Pendidikan dalam perencanaan pembelajaran, disertai program supervisi akademik yang lebih intensif guna memastikan penerapan asesmen formatif yang merata. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perlu dilembagakan sebagai rutinitas tahunan, bukan kegiatan insidental.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan dilakukan kajian komparatif antara sekolah yang mempertahankan RKJM dan yang beralih ke PBD, penelitian tentang resolusi kesenjangan regulatif RKJM-PBD, serta studi mendalam mengenai kualitas partisipasi stakeholder dalam siklus perencanaan pendidikan. Penelitian tentang integrasi indikator karakter dan kreativitas ke dalam sistem PBD berbasis Rapor Pendidikan juga sangat relevan untuk mendukung pencapaian visi sekolah secara holistik dan terukur.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. A. P., E. M. Sulistiyorini, M. Kurniawan, and N. A. N. Murniati. 2023. "Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Dalam Perencanaan Berbasis Data." *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 10(2):229–35. doi: 10.24256/kelola.v10i2.8104.
- Calam, A., and A. Qurniati. 2016. "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan." *Jurnal SAINTIKOM* 15(1):53–68.
- Freeman. 1984a. "Stakeholder Theory: A Libertarian Defense." *Business Ethics Quarterly* 12(3):331–49.
- Freeman. 1984b. *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Philips: Cambridge university press.
- Herfiyanti, N., W. Setiyanti, and A. Wulandari. 2024. "Peningkatan Mutu Sekolah Dengan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 4(3):508–12. doi: 10.51878/learning.v4i3.3149.

- Hidayat, and Machali. 2018. "Pemasaran Dan Upaya Dalam Mempengaruhi Harapan Stakeholder Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14(2). doi: 10.34001/tarbawi.v14i2.621.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional Republik. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Jaenudin, J. 2024. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan." *Journal of Education Research* 5(1):939-44. doi: 10.37985/jer.v5i1.937.
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, Kebudayaan. 2022. Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan. Jakarta, Indonesia: Kemendikbudristek.
- Machali, I., and A. Hidayat. 2016. *The Handbook of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyasa, Enco. 2022. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. Enco. 2022. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Musakirawati, M., J. Jemmy, F. Anggriawan, F. A. Triansyah, A. Akib, and A. Tahir. 2023. "Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Indonesia Terhadap Perencanaan Berbasis Data." *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 7(2):201-8. doi: 10.26740/jdmp.v7n2.p201-208.
- Sagala, S. 2013. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Membuka Ruang Kreativitas, Inovasi, Dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta.